

**IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN**

(STUDI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FEBRIYA SANDI T.A.H

NIM. 0810110132



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

ABSTRAKSI

FEBRIYA SANDI T.A.H, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013 “IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN (STUDI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)”;; Dr. Istislam ,S.H ,M.Hum; Sucipto ,S.H. ,M.H.

Penelitian Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan adalah penelitian yang terfokus pada realisasi implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan. Yaitu realisasi pelaksanaan kebijakan dalam meenerbitkan izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Permasalahan pokok serta fokus yang dijadikan dasar penelitian dan penyusunan karya tulis ini adalah untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis implementasi penerbitan izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 sehingga dapat diketahui efektivitasnya saat Peraturan Pemerintah berlaku dan dilaksanakan di daerah, khususnya di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. Digunakannya yuridis sosiologi adalah untuk mengetahui bahwa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan) ditinjau dari realisasi implementasi atau pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 di dalam masyarakat. Dilakukan analisa data menggunakan deskriptif analisis adalah untuk memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian dari hasil penelitian tersebut dilakukan analisis tentang realisasi implementasi atau pelaksanaan penerbitan izin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemerintah

Kota Malang belum memakai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 untuk melakukan pembuatan izin lingkungan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dari realisasi implementasi penerbitan izin lingkungan serta hambatan dan solusi dari realisasi implementasi penerbitan izin lingkungan tersebut di Kota Malang. Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan di Kota Malang belum dilakukan. Hal ini terkendala oleh faktor sarana prasarana atau fasilitas untuk melakukan pelaksanaan penerbitan izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Faktor sarana prasarana atau fasilitas tersebut adalah belum adanya peraturan-peraturan di daerah meliputi PERDA (Peraturan Daerah) ataupun PERWALIKOTA (Peraturan Walikota) yang digunakan sebagai dasar acuan prosedur tetap untuk melakukan pelaksanaan mandat pembuatan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Kata Kunci:

Implementasi, penerbitan, izin lingkungan.

ABSTRACT

T.A.H, FEBRIYA SANDI, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, February 2013 "IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PERMIT ISSUANCE BASED GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 YEAR 2012 CONCERNING ENVIRONMENTAL PERMIT (STUDY ON BADAN LINGKUNGAN HIDUP MALANG CITY)"; Dr.. Istislam, S.H, M.Hum; Sucipto, SH , M.H.

Implementation Research Environmental Permit Issuance According to Government Regulation Number 27 Year 2012 on Environmental Permit is research focused on the realization of the implementation or execution of a policy. That realization meenerbitkan policy in the environmental permit after issuance of Government Regulation Number 27 Year 2012.

A primary issue and focus as the basis of the research and preparation of this paper is to investigate, discover and analyze the implementation of the issuance of the environmental permit after issuance of Government Regulation 27 of 2012 so it's effectiveness can be seen as government regulation applicable and implemented in the region, particularly in the city of Malang.

This study uses juridical and sociological analysis of the data by using descriptive analysis. The use of juridical sociology is to know that the rule of law in the legislation (Government Regulation Number 27 Year 2012 on Environmental Permit) in terms of the realization of the implementation or execution of Government Regulation Number 27 Year 2012 on the community. Analyzed the data using descriptive analysis is to describe and illustrate the results of research conducted, then from hasi study conducted an analysis of the realization of the implementation or execution of the issuance of permits under Government Regulation Number 27 of 2012 in the City of Malang. Based on these results it can be seen that the Government has not put Malang Government Regulation Number 27 of 2012 to undertake the manufacture of environmental permits.

The conclusion of this study was to determine the effectiveness of the realization of the implementation of the issuance of environmental permits as well as the barriers and solutions from the realization of the implementation of the issuance of the environmental permit in the city of Malang. Implementation of Environmental Permit Issuance Based on Government Regulation Number 27, 2012 on the implementation of the Environmental Permit issuance environment in Malang has not been done. It is constrained by factors of infrastructure or facilities to carry out the implementation of the issuance of environmental permits in accordance with Government Regulation Number 27, 2012. Factors such infrastructure or facilities is the absence of regulations in the area include PERDA (local regulation) or PERWALIKOTA (Regulation Mayor) is used as a basic reference implementation of standard operating procedures to conduct an environmental permit creation mandate based on Government Regulation Number 27, 2012 on Environmental Permit.

Keywords:

Implementation, publishing, environmental permit.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Saat ini pembangunan di Indonesia khususnya di wilayah Malang Raya semakin berkembang dengan pesat. Dengan banyaknya pembangunan bangunan-bangunan gedung, gedung apartemen, hotel, perumahan-perumahan warga, pembangunan bangunan untuk industri dan tempat pariwisata. Dari semua perkembangan pembangunan di Kota Malang, perlunya perhatian khusus dan mendalam dari efek-efek yang akan dan/atau mungkin saja terjadi pada lingkungan, perlunya memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.

Sebelum melaksanakan suatu pembangunan, penting diperhatikan dalam pengkajian guna bangunan yang akan dibuat dan analisis secara kritis serta mendalam terhadap efek yang timbul pada lingkungan hidup. Kajian tersebut adalah *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)* merupakan dokumen kelayakan lingkungan bagi unit usaha yang melakukan pembangunan kegiatan usaha. Setelah itu pada awal tahun 2012 terdapat perubahan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan menjadikan dokumen *AMDAL* merupakan salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya ***Izin Lingkungan*** yang digunakan

¹Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.1.

sebagai izin bagi unit usaha yang hendak melakukan kegiatan/usaha. Secara prosedur, *AMDAL* menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya *Izin Lingkungan*, yang menjadi syarat untuk meraih izin usaha dan/atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan di sekitar usaha. Dengan adanya Izin Lingkungan diharapkan suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan selalu diiringi dengan standar pengelolaan lingkungan dan perlindungan pelestarian sumber daya alam yang ada.

Dalam pembuatan izin lingkungan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

AMDAL meliputi berbagai aspek yang menjelaskan apa dan dimana sebuah usaha / pembangunan dilakukan, teknologi yang akan digunakan, juga bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan. Selain itu *AMDAL* akan menjelaskan bagaimana pengelolaan limbah dan kualitas air serta lingkungan sekitar yang akan dikenai dampak atas beroperasinya usaha tersebut.

Dapat disimpulkan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ditinjau dari pesatnya perkembangan dalam pembangunan di Kota Malang yang dalam pembangunannya berkonsep pada pembangunan berkelanjutan. Disertai adanya suatu perubahan dasar hukum dalam perizinan lingkungan yaitu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang membuat adanya suatu aturan hukum baru dalam pelaksanaan perizinan lingkungan, khususnya pelaksanaan perizinan lingkungan di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tentang perkembangan pembangunan di Kota Malang dan perubahan dasar hukum dari perizinan lingkungan yang terkait tentang pelaksanaannya maka dalam tulisan ini memuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerbitan izin lingkungan di Kota Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012?
2. Apa hambatan dalam implementasi penerbitan izin lingkungan sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, serta solusi apa yang dilakukan oleh Pemkot Malang dalam menghadapi hambatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 di Kota Malang?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris kualitatif, yaitu menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari "*frame of reference*" si pelaku sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.² Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang

² Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 15.

berlaku.³ Dimaksudkan empiris kualitatif karena penelitian ini untuk mengetahui kondisi secara faktual implementasi penerbitan izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, khususnya implementasi penerbitan izin lingkungan di Kota Malang.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan perizinan lingkungan ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang meninjau hukum secara normanya dan peraturan perundang-undangnya dalam implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangnya di masyarakat. Digunakannya pendekatan yuridis sosiologis ini karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara langsung tentang efektifitas dari suatu pelaksanaan peraturan/hukum yang berlaku. Yaitu implementasi penerbitan izin lingkungan setelah berubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di dalam masyarakat, pada ranah hukum administrasi negara di Pemerintahan Kota Malang, yang khususnya tentang pelaksanaan perizinan lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jenis Data Primer, jenis data primer dalam penelitian tentang pelaksanaan perizinan lingkungan didapat melalui wawancara

³Ibid, hal 20-21

langsung secara terstruktur maupun tidak terstruktur pada Kepala dan staff Badan Lingkungan Hidup Kota Malang antara lain: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota, Ka. Sub. Bag., Ka. Sub. Bid. Dokumen Lingkungan, Ka. Sub. Bid. Pengawasan, Ka. Sub. Bid. Pengendalian Lingkungan, serta melakukan wawancara singkat dengan para pemrakarsa yaitu: Bobby Hermawan, Ir. Ichsan Suaidi, Ir. Eryan Adi Nugroho, Teguh Kristanto, Susiwanto, Gunawan Tjokrohadi, Tatang Sukmana, Yan Permadian Tesna ,S.T serta pengamatan tidak terlibat.

- b. Jenis Data Sekunder, jenis data sekunder dalam penelitian tentang pelaksanaan perizinan lingkungan adalah diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan melalui internet.

Selain jenis data yang digunakan dalam penelitian tentang izin lingkungan, terdapat sumber-sumber data yang valid dan memberikan petunjuk dan penjelasan terperinci pelaksanaan perizinan lingkungan di Kota Malang, antara lain:

- a. Sumber Data Primer, sumber data primer dalam penelitian tentang Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan adalah diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan staff Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup terkait dengan proses penyusunan dokumen lingkungan serta wawancara secara langsung kepada pihak pemrakarsa penyusunan dokumen lingkungan di Kota Malang.
- b. Sumber Data Sekunder, sumber data sekunder dalam penelitian tentang pelaksanaan izin lingkungan diperoleh dari Perpustakaan

Umum Kota Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta literatur yang dimiliki oleh penulis, serta hasil dari peraturan perundang-undangan, dan penelusuran melalui internet yaitu penelusuran bahan presentasi pembahasan Izin Lingkungan dari web Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara langsung pada responden. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara tersebut dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai dasar pedoman untuk melakukan wawancara, tetapi masih memungkinkan dilakukannya variasi-variasi dalam wawancara yang disesuaikan dengan situasi dan data yang diperoleh saat wawancara.

Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan cara wawancara terarah, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa, proses tanya jawab ini secara langsung dengan responden, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah atau pertanyaan yang akan diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan/atau staff Badan Lingkungan Hidup yang mampu memberikan informasi dan keterangan tentang data yang diperlukan untuk penelitian.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengutip dan menganalisa studi kepustakaan atau literatur, serta memilah peraturan-peraturan terkait dengan perizinan lingkungan yang digunakan sebagai dasar hukum dari pelaksanaan izin lingkungan di Kota Malang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data di dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian data-data tersebut disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum sesuai atau bahkan tidak sesuai antara realita pelaksanaan dengan ketentuan hukum yang ada.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Malang Setelah Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, pelaksanaan penerbitan izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012, belum dilaksanakan secara efektif atau belum terprogram di Kota Malang. Bukti dari tidak dilaksanakannya penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah dari hasil wawancara kepada para staff dan Kepala Badan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data pembangunan di Kota Malang, pada tahun 2012 pembangunan yang wajib memiliki AMDAL berjumlah 3 pemrakarsa. Berikut tabel data pembuatan dokumen Amdal pada tahun 2012:

INVENTARISASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG (AMDAL) TAHUN 2012

Gambar Tabel Inventarisasi Dokumen AMDAL

No	Nama Kegiatan	Identitas Pemrakarsa	Penanggungjawab Usaha/Kegiatan	Lokasi	Tanggal/Nomer Persetujuan/SK	Jenis Dokumen
1	Resto & Pub Ametist	-	Bobby Hermawan Jl. Simp Borobudur II/30	Jl. Veteran No.8	20 Pebruari 2012 660/155/35.73.406 /2012	AMDAL
2	Pembangunan Hotel Aston Paramount	PT. Paramount Propertindo	Ir. Eryan Adi Nugroho Jl. Jambu Blok T no.1 Pancoran Jakarta	Jl. Letjen S Parman	11 April 2012 660/568/35.73.406/ 2012	AMDAL
3	Mall Dinoyo City	PT. Gading Asritama	Ir. Ichsan Suaidi Jl. Sukarno hatta D-401	Jl. MT. Haryono	31 Mei 2012 660/893/35.73.406/ 2012	AMDAL

Sumber: Arsip Data Pembuatan Dokumen Amdal di Kota Malang, 2012

Sedangkan untuk pembuatan dokumen lingkungan yang tidak wajib AMDAL, diwajibkan untuk membuat dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL), beberapa contoh pemrakarsa dokumen lingkungan UKL-UPL pada tahun 2012:

Gambar Tabel Dokumen UKL-UPL

No	Nama Kegiatan	Identitas Pemrakarsa	Alamat Pemrakarsa	Lokasi Kegiatan	Tanggal/Nomer Persetujuan/SK	Jenis Dokumen
1	Hotel Ollino Garden	Gunawan Tjokrohadi	Jl. Panglima Sudirman No. 25 Klojen	Jl. Aris Munandar No. 37-45	10 Januari 2012 556.2/02/UKL-UPL/35.73.406/2012	UKL-UPL

2	Pembangunan Hotel Ijen	Tatang Sukmana (Hotel Ijen)	Jl. Ijen Nirwana Raya Blok A No. 16	Jl. Ijen Nirwana Raya Blok A No. 16	20 Maret 2012 556.2/48/UKL-UPL/35.73.406/2012	UKL-UPL
3	Kawasan Pemukiman Perumahan Gasek Tidar Residence	Yan Permadian Tesna ,S.T	Jl. Bend. Sigura-gura Barat Kav. 14 Rt 4 Rw 8 Kel Karangbesuki Kec Sukun	Jl. Candi V E Kel Karangbesuki Kec Sukun	25 Juli 2012 648/120/UKL-UPL/35.73.406/2012	UKL-UPL
4	Klinik Pratama PT. Kereta Api (Persero)	Susiswanto	Jl. Simp. Teluk Bayur No. 10 D Rt 4 Rw 8 Kel Pandanwangi	Jl. Panglima Sudirman No. 5	28 November 2012 448/192/UKL-UPL/35.73.406/2012	UKL-UPL
5	PT. Bentoel Prima (Industri Rokok SKT)	Teguh Kristanto	Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec Singosari	Jl. Niaga No. 4 Sukun	530/264/UKL-UPL/35.73.406/2012	UKL-UPL

Sumber: Arsip Data Pembuatan UKL/UPL Di Kota Malang, 2012

Dilihat dari data-data tersebut dan hasil wawancara kepada para responden, dalam implementasi penerbitan izin lingkungan di Kota Malang tetap menggunakan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal dan Perda Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Amdal, serta Peraturan Walikota Malang Nomor 16 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Kajian Lingkungan sebagai dasar pelaksanaan perizinan lingkungan di Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur, menurut para pemrakarsa baik terkait pembuatan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL di Kota Malang, responden belum mengetahui tentang adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dan para pemrakarsa tetap mengajukan dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, perda dan perwalikota yang sudah ada.

Berdasarkan asas hukum "*lex posteriori derogat lex priori*" bahwa perundang-undangan paling akhir atau baru mengesampingkan perundang-undangan yang lebih dulu atau yang lama⁴, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dikesampingkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Dengan dikesampingkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL bukan berarti terdapat kekosongan hukum di Kota Malang terkait berubahnya peraturan mengenai pelaksanaan perizinan lingkungan. Meskipun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 belum dilaksanakan secara efektif atau belum terprogram, tidak menjadi alasan tidak melakukan perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan sebagai kewenangan daerah dalam melaksanakan, memantau dan mengawasi perizinan lingkungan di Kota Malang, Perda Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perwalikota Malang Nomor 16 Tahun 2009 masih tetap berlaku dan harus ditaati oleh semua pihak baik pada instansi teknis Badan Lingkungan Hidup, para pelaku pembangunan, komisi teknis perizinan lingkungan, serta masyarakat umum lainnya yang hendak melakukan penyusunan dokumen lingkungan, hingga diterbitkannya perda/perwalikota Malang terbaru yang mengatur lebih rinci terkait izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

⁴Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 106.

2. Hambatan dan Solusi Dalam Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Malang

a. Hambatan dalam implementasi penerbitan izin lingkungan di Kota Malang

Hambatan yang dihadapi pemerintahan Kota Malang dalam melaksanakan penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah belum adanya peraturan daerah/peraturan walikota terbaru terkait pelaksanaan penerbitan izin lingkungan. Hal ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 baru saja terbit pada tanggal 23 Februari 2012, yang tidak mungkin bagi Pemerintah Kota Malang langsung mengadopsi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar pelaksanaan penerbitan izin lingkungan di Kota Malang. Haruslah Pemerintahan Kota Malang terlebih dahulu melakukan pengkajian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kemudian dilanjutkan pada perumusan Perda atau Perwalikota Malang terkait pedoman penyusunan dan pelaksanaan izin lingkungan, yang dalam perancangannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

b. Solusi implementasi penerbitan izin lingkungan di Kota Malang

Solusi dari hambatan pelaksanaan penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang segera mengagendakan untuk melakukan suatu rencana perancangan Perda/Perwalikota Malang yang baru atau membuat rencana perancangan revisi Perda/Perwalikota yang lama, yang akan dilakukan segera pada tahun 2013.

Pada Badan Lingkungan Hidup wilayah Kota Malang segera melakukan sosialisasi pada pelaku usaha/kegiatan pembangunan dan masyarakat umum bahwa pada tahun 2013 hendak dirancang Perda dan/atau Perwalikota Malang terkait tentang penyusunan dokumen-dokumen Izin Lingkungan dan prosedur tetap pelaksanaannya di Kota Malang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Pada saat menunggu dibuatnya Perda dan Perwalikota Malang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka dalam penerapan substansi Perda dan Perwalikota Malang yang lama harus disesuaikan dengan tujuan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan. Penerapan perda dan perwalikota yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah tersebut dengan cara diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Walikota Malang mengenai penyesuaian Perda/Perwalikota Malang tentang Perizinan Lingkungan untuk sementara menunggu dibuatnya Perda dan Perwalikota yang terbaru dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 di Kota Malang belum efektif. Karena dalam realitanya Pemkot Malang masih menggunakan Perda dan Perwalikota yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilihat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto yang menjadi faktor efektivitas pelaksanaan suatu peraturan atau hukum, salah satunya

adalah faktor dari hukumnya sendiri dan sarana prasarana atau fasilitas penegakan hukum tersebut.

Keefektifan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dilihat dari faktor pertama yaitu hukumnya sendiri, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap efektif untuk dilaksanakan di Kota Malang karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait tentang penerbitan izin lingkungan.

- b. Implementasi penerbitan izin lingkungan ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, tidak bisa secara serta-merta dilaksanakan di Kota Malang. Hal ini belum bisa ter-realisasi, karena salah satu faktor dari efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah terkait sarana prasarana atau fasilitas penegakan hukum. Sarana prasarana atau fasilitas penegakan hukum yang menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah berupa Peraturan-peraturan Daerah Kota Malang terkait dengan izin lingkungan dan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Malang terkait dengan prosedur tetap penyusunan dan pengesahan izin lingkungan. Belum adanya sarana penunjang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini memberikan suatu bentuk implikasi yaitu tidak/belum berlakunya izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Sehingga dalam implementasi penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 terhambat dan menjadikan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tidak/belum efektif untuk diterapkan di Kota Malang.
- c. Solusi dari ketiadaan Perda atau Perwalikota terkait penerbitan izin lingkungan adalah diterbitkannya rencana perancangan pembentukan

Perda atau Perwalikota Malang tentang penerbitan izin lingkungan pada tahun 2013.

2. Saran

Disarankan kepada :

- a. Pemerintah Kota Malang, agar segera merancang dan menerbitkan Perda/Perwalikota Malang yang mengatur lebih lanjut mengenai penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pemerintah Kota Malang harus segera merealisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan dibuatnya peraturan-peraturan, baik Perda (Peraturan Daerah) maupun Perwalikota (Peraturan Walikota) Kota Malang. Untuk menjamin kepentingan pembuat izin dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, menjamin kepentingan masyarakat apabila terkena dampak dari pengelolaan lingkungan oleh pembuat izin, dan menjamin keberlangsungan dan kelestarian lingkungan bagi anak-cucu di masa depan.
- b. Badan Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai instansi teknis perpanjangan dari Kementerian Lingkungan Hidup, agar segera melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan kepada masyarakat dan para pelaku usaha dan/atau kegiatan, baik usaha/kegiatan dalam menjalankan pembangunan maupun usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan.
- c. Pemerintah Kota Malang, bahwa selama masa transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ke Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di Kota Malang, belum terbentuknya

atau diterbitkannya Perda atau Perwalikota Malang yang terbaru mengenai Izin Lingkungan. Maka selama menunggu diterbitkannya Perda atau Perwalikota Malang yang menunjang efektivitas pelaksanaan penerbitan izin lingkungan perlu dibuatnya Surat Keputusan (SK) Walikota Malang mengenai penyesuaian substansi-substansi Perda atau Perwalikota yang lama yaitu mengenai Dokumen Amdal, prosedur penyusunan dan pengesahan dokumen amdal yang disesuaikan dengan substansi mengenai penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Surat Keputusan (SK) Walikota tersebut digunakan sebagai acuan peraturan sementara waktu, selama masa transisi perubahan peraturan pemerintah tersebut dan menunggu hingga diterbitkannya Perda dan Perwalikota Malang terkait Izin Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jur. Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lutfi Efendi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Moh. Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukhlis & Musthafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, 2012, <http://www.djpp.depkumham.go.id>, (27 Agustus 2012)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, <http://www.menlh.go.id>, (27 Agustus 2012)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jo Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <http://www.menlh.go.id>, (27 Agustus 2012)

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, <http://www.malangkota.go.id> (20 September 2012)

Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Kajian Lingkungan, <http://www.malangkota.go.id> (20 September 2012)

Makalah

Istislam, Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Lingkungan, Materi disajikan dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur, Surabaya, 2012.

Internet

Iin Pratama, 2012, Efektivitas Hukum, TJ'S Blog, <http://pratamain.blogspot.com/2012/12/efektivitas-hukum.html?m=1> (9 Januari 2012).